

ABSTRAK

Mendapatkan upah merupakan tujuan manusia dalam menjalani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bagaimana nasib pekerja/buruh jika terjadi pernyataan putusan pailit dijatuhkan dan seluruh aset debitor dikuasai oleh kreditor separatis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh kepada perusahaan yang tidak membayar upah/pesangon buruh ketika sudah dijatuhi putusan Pengadilan Niaga karena seluruh aset yang dimiliki oleh debitor dikuasai oleh kreditor separatis. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya namun tidak mendapatkan upahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematis norma dan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga terhadap kreditor separatis yang memperlakukan buruh secara tidak adil. Kedudukan pengusaha disini adalah debitor, sementara Pekerja/buruh mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 menegaskan pelunasan upah pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis, maupun kreditor preferen lainnya. Setelah itu hak-hak pekerja lainnya akan dibayar sesuai dengan ketentuan awal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, Upah Pekerja, Permohonan Pailit

ABSTRACT

Earn is the purpose of human beings in their daily work to meet his life. But how the fate of workers if there is a statement of the decision of the bankrupt overthrown and all the assets of the debtor controlled by the separatist creditors. The purpose of this research is to analyze the efforts of the law that can be done by workers to companies that did not pay the wages/generous severance of labor when it was sentenced to a Commercial court because all assets owned by the debtor controlled by the separatist creditors. This leads to injustice for workers who have been working to meet their needs but does not receive the reward. The method used in this research was a normative juridical method to examine the applicable norms and law systematically. According to the Act No. 37 of 2004, laborers are able to make a submission a “gugatan lain-lain” to Commercial court against the separatist creditors who treat workers is not just. The entrepreneur has a position as a debtor, while the workers / laborers have a position as preferential creditor. Constitutional Court Decision No. 67 of 2013 affirms that the workers payment is more important than the other creditors, such as separatist creditor as well as other preferential creditors. After that, other rights of workers will be paid according to the initial provisions on the Act No. 37 of 2004.

Keywords : Bankruptcy, Workers Payment, Bankruptcy Petition